

SURAT - KETERANGAN

No. Pol : Sket/ 313/VII/1996/Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. PRATAMA ADYASASTRA
Pangkat / Nrp : Kapten Polisi / 68090397
Jabatan : Wakasat Lantas
Kesatuan : Poltubes Semarang

Dengan ini menjerangkan bahwa :

N a m a : HERRY PRAMONO W
Pekerjaan : Mahasiswa FH. UNIKA SOEGIJAPRANATA
Nrp / Nama : 98.20.818/92.6.111.G1000.50053
Alamat : Jl. Menoreh Tengah III No. 53 Semarang

Berlab melaksanakan Riset / Survey di Kantor Sat Lantas Poltubes Semarang, guna penyusunan skripsi dengan judul "MEKANISME PENEGRAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS HERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN

Ismikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Juli 1996

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RAKYAT KOTA BESAR SEMARANG
JUH DAERAH JAWA TENGAH



KEPALA KEPOLISIAN RAKYAT KOTA BESAR SEMARANG NRP 68090397

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-~~DT~~/P.3.9/Gun/06/1998

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| a. Nama | : | IMAN PRANGTAWAT, S.H. |
| b. Pangkat / Gol | : | JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b) |
| c. Jabatan | : | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| a. Nama | : | HERRY PRAMONO WANGOLANGI |
| b. Tempat / tanggal lahir | : | BANJARMERATA, 10 September 1974 |
| c. Kebangsaan | : | INDONESIA |
| d. Agama | : | KRISTEN |
| e. Pekerjaan | : | MALAKESIA |
| f. Alamat | : | 1930 PERUM BENGAH III NO. 33 SEMARANG |

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal

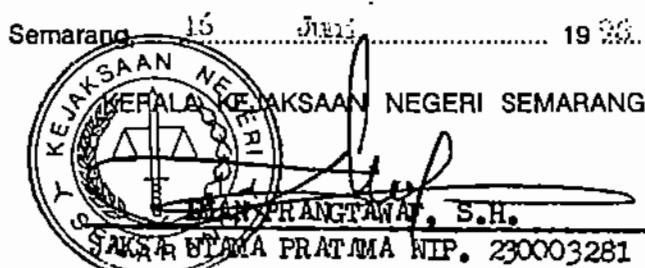
14 Juni 1998 sampai dengan tanggal 15 Juni 1998

guna menyusun Skripsi / Karya Ilmiah Sarjana ... HUKUM (S1)

yang berjudul : " MEKANISME HUKUM DALAM PEMERINTAHAN KEGIATAN LALU LINTAS -

BERAKIBAT KETIKA DILAKUKAN JALAN "

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya



Nomor : 87 / Rst/19 98
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N
NO.: 87 / Rst / 19 98

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan:-

Nama : HERRY PARMONO WAWOLANGI
No.Induk : 92.6.111.01000.50053
Fak/Jurusan : Hukum Pidana (SOEGIJAPRANATA)
Alamat : Jl.Menoreh Tengah III No.33 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 09 Juni 1998 sampai dengan tanggal - 02 Juli 1998 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul ; MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 02 Juli 1998



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JI. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/327/ / v / 98.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Surabaya, 30 Mei 1998.

KEPADА
Yth. Ketua BAPPEDA Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
di-

SEMARANG

Membaca surat Dekan Fak. Ilukum Unika Soogijapranata Somarang nomor D.2.02/3438/UKS.05/V/1998 tanggal 26 Mei 1998 malausd Sdr. HENRY PRAMONO W. alka mengadakan penelitian tentang : " MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN ", untuk skripsi

Lokasi : Kodya Semarang
Waktu : 1 Juni 98 s/d 1 Juli 98
Penanggung Jawab : Petrus Soerjowinoto, SH. MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survei/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan menjalin tata terib seria ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



Oleh karena mengingat permasalahan mengenai penegakan hukum sangat luas, maka penulisan hukum ini dibatasi hanya pada penegakan hukum di tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.

Sedangkan perumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat atau tidaknya penahanan, prosedur penahanan terhadap perkara kecelakaan tersebut dan kendala-kendala yang timbul dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain tersebut. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat atau tidaknya penahanan, untuk mengelahui mengenai prosedur penahanan, dan kendala-kendala yang timbul dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain tersebut. Kegunaan dari penulisan hukum ini, adalah untuk menyumbangkan ide-ide, pemikiran-pemikiran baru sehingga dapat memotivasi penegak hukum dalam tugasnya untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan di bidang kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain dan untuk menyumbangkan literatur dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya di bidang hukum pidana serta menambah pengetahuan hukum bagi penulis sendiri khususnya dalam mekanisme penegakan hukum terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain.

Teori-teori yang digunakan antara lain mengenai pengertian penegakan hukum yang berupa penahanan, pihak-pihak yang terkait dalam

mekanisme penegakan hukum tersebut dan mengenai perkara kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang lain ditinjau dari Pasal 359 KUHP, serta unsur-unsur di dalam Pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, penentuan sampel menggunakan sistem purposive sampling yaitu mengambil responden yang mewakili populasi untuk tujuan tertentu, pengumpulan data menggunakan data primer yang terdiri dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang terdiri dari studi kepustakaan. Metode analisa data menggunakan metode kualitatif yang bertitik tolak pada peraturan yang berlaku dan usaha penemuan informasi tentang perumusan masalah yang diteliti, disertai dengan tabel. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar dalam penulisan hukum ini, disertai dengan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Kendala-kendala dalam mekanisme penegakan hukum tersebut, disebabkan oleh adanya beberapa faktor baik itu dari penegak hukum itu sendiri maupun dari pihak pelaku, serta tidak menutup kemungkinan dari pihak keluarga korban. Kendala yang terulama yaitu timbulnya tidak terdapat saksi dalam suatu perkara, sehingga menghambat jalannya mekanisme penegak hukum tersebut dapat berjalan. Hal itu merupakan salah satu dari beberapa hambatan yang timbul.

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka dapat diketahui dalam mekanisme penegakan hukum tersebut masih memerlukan adanya pembinaan